

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tiongkok merupakan satu-satunya negara didunia yang mewajibkan *animal testing* atau pengujian terhadap hewan untuk produk kosmetik yang akan dipasarkan di pasar Tiongkok. Hal ini didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Tiongkok dan semua produk kosmetik memerlukan persetujuan *Chinese Food and Drug Administration* (CFDA) sesuai dengan peraturan mengenai pengawasan higienis suatu kosmetik yang akan disetujui oleh Kementerian Kesehatan Tiongkok untuk dipasarkan di Tiongkok. *People for The Ethical Treatment of Animals* (PETA) sebagai *International Non Governmental Organization* (INGO) yang menjunjung *animals right* tentu saja bertentangan dengan kebijakan yang dimiliki oleh Tiongkok. PETA melakukan beberapa upaya kepada Tiongkok dimulai dari tahun 2012 dengan harapan metode *animal testing* bisa dihapuskan oleh pemerintah Tiongkok.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* yang mana terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu NGO (Non-Governmental Organizations) yang berskala nasional maupun internasional, gerakan sosial lokal, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.

Untuk mencapai tujuannya, PETA melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu PETA berhasil mengungkapkan adanya 4 brand ternama yang sengaja membayar pemerintah Tiongkok untuk melakukan *animal testing* pada produknya padahal 4 brand tersebut terdaftar sebagai produk yang tidak melakukan uji coba pada hewan. Semenjak itu, PETA melakukan upaya terhadap pemerintah Tiongkok dalam kasus *animal testing* antara lain PETA membuat daftar perusahaan yang melakukan dan yang tidak melakukan *animal testing* di Tiongkok, membuat program “*Beauty Without Bunnies*”, bekerjasama dengan *Institute for In Vitro Sciences (IIVS)*; *Beijing Technology and Business University (BTBU)*, *Chinese Animal Protection Network (CAPN)* untuk menyebarkan isu *animal rights* Berdasarkan upaya yang PETA lakukan, PETA bekerjasama dengan *Institute for In Vitro Sciences (IIVS)* yang merupakan NGO (Non-Governmental Organizations), para peneliti Tiongkok, *Beijing Technology and Business University (BTBU)* sebagai tempat pelatihan ilmuwan dan peneliti, *Chinese Animal Protection Network (CAPN)* sebagai NGO lokal Tiongkok dan bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok untuk menangani komersialisasi produk berbasis *animal testing* di Tiongkok. Peneliti melihat bahwa dari keempat strategi yang ada, strategi yang sangat berpengaruh adalah strategi *leverage politics* karena disanalah terlihat bagaimana PETA membangun kerjasama dengan aktor lain untuk menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan produk yang berbasis *animal testing* di Tiongkok.

Pada tahun 2016, pemerintah Tiongkok menyetujui Uji Fototoksisitas Netral Penyerapan atau *3T3 Neutral Red Uptake (NRU) Phototoxicity* yang merupakan uji

non-hewan sebagai syarat masuknya produk ke Tiongkok. Peneliti melihat bahwasanya upaya yang dilakukan oleh PETA sangat berdampak besar sehingga pemerintah menerima prosedur uji coba non-hewan meski pencapaian ini tidak diiringi dengan penghapusan metode *animal testing* di Tiongkok, namun dengan upaya yang dilakukan PETA, pemerintah Tiongkok tidak lagi mewajibkan *animal testing* sebagai syarat utama dan memperbolehkan perusahaan yang akan menjual produknya untuk memilih metode apa yang mereka inginkan.

5.2 Saran

Peneliti meyakini bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna namun upaya yang dilakukan oleh PETA memberi dampak yang signifikan terhadap prosedur masuknya barang kosmetik ke pasar Tiongkok sehingga pemerintah Tiongkok menerima prosedur pengujian non-hewan walau tidak menghapuskan prosedur *animal testing*. Upaya yang dilakukan oleh PETA masih berdampak sampai sekarang terhadap pemerintah Tiongkok karena pada tahun 2019, pemerintah Tiongkok kembali menerima masukan prosedur kedua untuk pengujian non-hewan dan diberlakukan pada 1 Januari 2020. Peneliti menyarankan pada peniliti selanjutnya dengan isu terkait untuk melihat upaya yang dilakukan PETA sehingga prosedur kedua ini diterima oleh Tiongkok dengan menitik beratkan strategi apa yang dipakai oleh PETA.